

RISIKO PENGENDALIAN SISTEM PENGELUARAN KAS PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL PURNA BAKTI

Yan Richo Napitupulu
Richoo.napitupulu@yahoo.com
Sugeng Praptoyo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out how the internal control system of cash expenses, how to determine the misstatement of cash expenses material, and how the outcome internal control system and the misstatement cash expenses material to the fluctuation the internal control risk cash expenses at PT. BTPN Purna Bakti. The responsibility the auditor is on the opinion the financial statement wheather it is reasonable or not which has been published and wheather the financial statement has met with financial accounting standard in Indonesia. The cash flow statement which ends in 31 st December 2010,2011,2012,2013,2014, data from the financial statement which presented online on official website of Bank Tabungan Pensiunan Nasional. The data research has been carried out by using qualitative. This case the tolerance maximum error is the number which has been determined the material misstatements. In case the amount misstatement cash is \leq from the determined amount, if it is not corrected, it will have an impact on the opinion the auditor, so the opinion of the auditor will be unqualified. Nevertheless, if there is a misstatement in cash \geq from the determined amount and not corrected, therefore the opinion of the auditor is qualified.

Keywords: *control risk, material misstatement, materiality percentage, the opinion of the auditor.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana sistim pengendalian *intern* pengeluaran kas, bagaimana menentukan salah saji material pada pengeluaran kas, dan bagaimana akibat sistim pengendalian *intern* dan salah saji material dalam pengeluaran kas, terhadap tinggi rendahnya risiko pengendalian pengeluaran kas pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Purna Bakti. Tanggung jawab auditor terletak pada opini atas wajar atau tidaknya laporan keuangan yang diterbitkan dan apakah laporan keuangan telah sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan arus kas yang berahir per tanggal 31 desember 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, berasal dari laporan keuangan yang disajikan *online* di *website* Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Data dari dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal ini toleransi kesalahan maksimal adalah jumlah yang sudah ditentukan dalam salah saji material. Apabila ada salah saji kas yang jumlahnya \leq jumlah yang ditentukan, jika tidak dikoreksi hal ini tidak berpengaruh terhadap opini auditor, sehingga opini auditor tetap WTP atau disebut dengan wajar tanpa pengecualian. Namun apabila ada salah saji pada kas \geq jumlah yang ditentukan dan tidak dikoreksi, maka opini auditor adalah wajar dengan pengecualian.

Kata kunci : risiko pengendalian, salah saji material, prosentase materialitas, opini auditor.

PENDAHULUAN

Masih hangat dalam ingatan tentang kasus kecurangan yang dilakukan Nick Leeson seorang pialang Inggris yang membuat *Bearings Bank* rugi sebesar USD 1.5 miliar (setara dengan Rp 14,3 triliun) dan *collapse*, maupun *fraud* yang baru-baru ini terjadi dilakukan oleh Jerome Kerviel sehingga mengakibatkan *Societe Generale Bank* menderita kerugian yang sangat besar USD 7.1 miliar (setara dengan Rp 67,5 triliun). Kasus tersebut menunjukkan terjadinya risiko yang menimbulkan *surprise* merupakan akibat dari proses kontrol risiko yang tidak efektif, sehingga dipastikan akan menghambat bahkan menggagalkan pencapaian tujuan organisasi yang memiliki reputasi internasional sekalipun.

Menurut Tuanakotta (2011:152) Risiko pengendalian adalah risiko tidak tercegahnya atau tidak ditemukannya kekeliruan dan salah saji yang *material*, dari kutipan tersebut menjelaskan tentang salah saji *material* adalah konsep *auditing* yang sangat penting, jika bukan yang terpenting. Dengan kata lain materialitas adalah mengukur beberapa besar dan pentingnya suatu salah saji atau bisa disebut dengan *misstatements* dalam laporan keuangan.

Dari kasus-kasus penyimpangan yang diakibatkan kelemahan pengelolaan risiko, menunjukkan betapa pentingnya kontrol risiko bagi suatu entitas agar dapat *survive* menghadapi turbulensi lingkungan maupun ketatnya persaingan. Risiko pengendalian adalah salah satu risiko dalam *audit risk*, selain *interen risk* dan *detection risk*. Tuanakotta (2015:234) juga menjelaskan tentang definisi risiko *audit* adalah risiko memberikan opini audit yang tidak tepat atau *expressing an inappropriate audit opinion* atas laporan keuangan yang disalah sajikan secara *material*. Tujuan audit adalah menekan risiko audit ketinggian yang lebih rendah yang dapat diterima oleh auditor.

Perkembangan proses tata kelola perusahaan beberapa tahun terakhir, memperlihatkan kecenderungan meningkatnya perhatian dan pemahaman manajemen untuk dapat mengontrol risiko bisnisnya secara baik. Hal ini antara lain dapat dilihat dari adanya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kontrol risiko maupun pembentukan unit kerja dalam meminimalis risiko yang ada, Baik resiko finansial maupun risiko manajerial. Risiko finansial sangat berkaitan dengan kegagalan perusahaan untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukan, sedangkan risiko manajerial berkaitan dengan kegagalan pimpinan perusahaan dalam mengelola perusahaannya yang pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Dalam hal ini peneliti juga melihat adanya kelemahan dalam sistim pengendalian kas khususnya dalam pengeluaran kas kepada para nasabah BTPN Indrapura, karena sering terjadi pemberian pinjaman kepada pensiunan tanpa mengisi kejelasan kondisi nasabah yang terbaru, sebagai contoh: kejelasan alamat domisili tidak sesuai dengan alamat yang tertera di sertifikat pensiun, no telpon nasabah terbaru tidak ada, dan tidak adanya pilihan untuk menambah no telpon kerabat atau saudara yang dapat dihubungi. Dalam hal ini peneliti melihat celah kelemahan dari sistim pengendalian kas, dan dapat menimbulkan piutang tak tertagih, menimbulkan rekening pasif dan collet, yang berakibat pada risiko audit.

Dari kasus - kasus tersebut, peneliti melihat betapa pentingnya kontrol *risk* pada pengeluaran Kas pada setiap aspek bisnis. Berdasarkan uraian diatas penulisan berkeinginan untuk membahas tentang: "Risiko Pengendalian Sistim Pengeluaran Kas Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Purnabakti Cabang Indrapura Surabaya".

TINJAUAN TEORITIS

Risiko dan Jenis Risiko pemeriksaan

Harjito dan Martono (2014:415) menjelaskan bahwa Pengertian risiko sendiri merupakan penyimpangan hasil *return* yang diperoleh dari rencana hasil *return* yang diharapkan. Dengan demikian apabila kita membicarakan risiko investasi berarti kita menganalisis kemungkinan tidak tercapainya hasil (keuntungan) yang diharapkan.

Menurut Idroes (2008:4) resiko merupakan bahaya, atau dapat disimpulkan bahwa resiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Kata kuncinya adalah "tinjauan" dan "dampak atau sisi yang berlawanan". Penjelasan adalah sebagai berikut. Guna mempertahankan eksistensi kehidupan, maka diperlukan suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan tindakan atau aktivitas. Dan aktivitas tersebut memiliki risiko, dan jika dampaknya berlawanan, aktivitas akan memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kembali kepada contoh yang diatas, untuk bekerja, terdapat risiko hilangnya waktu senggang, gangguan kesehatan, serta kemungkinan dipecat.

Idroes (2008:5) menjelaskan Ada dua klasifikasi utama mengenai risiko, yakni risiko bisnis atau biasa disebut dengan *business risk* dan resiko kecurangan atau biasa disebut dengan *fraud risk*. Dalam kedua resiko ini ada kemungkinan salah saji yang material, perbedaannya adalah, risiko kecurangan itu mengandung unsur kesengajaan. Untuk tujuan pembahasan, kerentanan terhadap risiko atau biasa disebut dengan *risk exposure* dikelompokkan menjadi resiko rendah atau *low risk*, resiko sedang atau *moderate risk* dan resiko tinggi atau biasa disebut dengan *high risk*.

Pengertian pengendalian dan Risiko pengendalian

Menurut Mulyadi (2002:19) pengendalian adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Dari pengertian tersebut kesimpulan yang diambil oleh peneliti adalah bahwa saat ini kita sedang memasuki babak ketiga dari kontrol risiko atau bisa disebut pengendalian risiko. Beliau mengatakan bahwa pada babak pertama perusahaan-perusahaan belum berupaya untuk memperkecil risiko mereka, sehingga kejadian-kejadian seperti kecelakaan kerja relatif sering terjadi. Akibat dari kejadian itu, timbullah berbagai kerugian, baik dari perusahaan asuransi karena pembayaran klaim yang berakibat mengurangi profit atau bahkan merugikan perusahaan, sehingga kedua belah pihak menderita kerugian. Pada babak kedua kontrol risiko, perusahaan memperlakukan risiko dengan cara yang proaktif. Perusahaan tersebut menyadari bahwa pengurangan risiko dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan kebijakan-kebijakan dan pelatihan-pelatihan. Contohnya: peluncuran kebijakan kata 'DILARANG MEROKOK' dapat mengurangi risiko kebakaran. Kebijakan pada babak kedua ini antara lain akibat dari penjelasan-penjelasan yang dilakukan oleh pihak asuransi. Hal ini juga akibat dari usaha yang dilakukan oleh serikat pekerja yang menginginkan manajemen perusahaan untuk turut memikirkan masalah-masalah risiko yang mengancam para pekerja saat menjalankan tugasnya.

Pada babak ketiga kontrol risiko, perusahaan melakukan penilaian terhadap risiko dengan cara meneliti risiko-risiko. Misalnya pada suatu kontrak usaha, perusahaan diharapkan dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin timbul, atau melakukan *hedging* agar nilai tukar mata uang menjadi tetap untuk waktu tertentu di masa mendatang. Dengan cara-cara seperti itu justru perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profit. Diatas semua itu, perusahaan-perusahaan dapat

mengatur risiko sebagai suatu sistem. Dalam hal ini sistem manajemen risiko memberikan ukuran bahwa perusahaan mengatur ancaman-ancamannya didalam suatu cara yang proaktif, terkoordinasi, bernilai efektif, dan memahami pemrioritasan. Dengan memberikan pengertian yang baik pada karyawan maupun manajer mengenai pentingnya pengendalian risiko sudah tentu diharapkan, dan mereka sangat turut serta dalam menjalankan perusahaan dengan lebih efektif sehingga perusahaan dapat terus berkembang. Menurut Umar (1998:27) setelah menentukan risiko, kini kita akan membahas kegiatan untuk membuat strategi dan kebijakan apa yang harus dilakukan terhadap risiko.

Tuanakotta (2011:152) menyimpulkan bahwa Risiko pengendalian adalah risiko tidak tercegahnya atau tidak ditemukannya kekeliruan dan salah saji yang *material*, dalam waktu yang singkat, oleh sistem pengendalian intern pada entitas itu sendiri. Salah satu contoh : perusahaan mempunyai pengendalian intern untuk penjualan kredit. Manajer kredit harus mereviu semua permohonan kredit, dengan tujuan menekan angka kredit macet. Manajer kredit menyetujui penjualan kredit untuk seorang pelanggan yang dimasa lalu beberapa kali tidak menyelesaikan kewajibannya. Dari contoh kasus tersebut dapat terjadi Kredit macet berulang kembali, dan perusahaan terpaksa menghapuskan piutang macet tersebut.

Tuanakotta (2013:353) menjelaskan bahwa satu-satunya tujuan pengendalian ialah untuk menanggulangi risiko atau *to mitigate risk*. pengendalian tanpa risiko yang harus ditanggulangi, adalah kesia-siaan. Risiko harus ada terlebih dahulu, sebelum risiko itu ditanggulangi dengan pengendalian manajemen. Akan tetapi banyak auditor mengabaikan hal tersebut, dan kebanyakan auditor mulai meevaluasi pengendalian intern dengan mendokumentasikan sistem dan pengendalian yang ada. Seharusnya auditor tersebut memulai dengan mengidentifikasi risiko yang ada dan memitigasi risiko yang perlu dilakukannya proses mitigasi. Dalam hal ini ,Tuanakotta menyebutkan bahwa pendekatan yang benar adalah menghindari dokumentasi yang tidak perlu, mengenai sistem, proses, dan pengendalian yang sama sekali tidak relevan dengan auditnya.

Dalam penjelasan risiko pengendalian, yang dijelaskan oleh tuanakotta hampir sama dengan penjelasan yang telah dikutip oleh web yang bernama jurnal akuntansi keuangan.com yang menyebutkan bahwa risiko pengendalian adalah risiko yang bisa timbul akibat kelemahan sistem pengendalian intern audit dalam hal ini terjadi karena desainnya yang lemah, atau pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan mencegah potensi salahsaji bersifat material atau penggelapan *fraud*. *Control risk* tidak bisa dikendalikan oleh auditor akan tetapi bisa dikendalikan oleh audit jika auditor tersebut mau untuk meminimalis risiko yang ada. Karakter perusahaan ber *control risk* tinggi, antara lain adalah Struktur Organisasi , tidak jelas dengan pembagian tugas yang juga tidak jelas. Jika ini terjadi maka bisa dipastikan *control risk* nya tinggi.

Materialitas dan Salah saji material

Menurut Tuanakotta (2015:121) menjelaskan bahwa materialitas atau *materiality* adalah konsep *auditing* yang sangat penting, jika bukan yang terpenting. Materialitas mengukur beberapa besar dan pentingnya suatu salah saji atau *misstatements* dalam laporan keuangan.dan jika menurut ketentuan Bapepam, materialitas adalah besarnya informasi akuntansi, yang bergantung pada ukuran dan sifat serta apabila terjadi kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.

Menurut Tuanakotta (2015:118) Risiko salah saji yang *material* merupakan kombinasi dari risiko bawaan atau bisa disebut dengan *inherent risk*, dan risiko pengendalian atau disebut

dengan *control risk*. Oleh karena itu, proses penilaian atau *assessment process* meliputi keduanya. Mengenai risiko bawaan, auditor menentukan potensi salah saji yang berkenaan dengan asersi yang diangkat. Dan kemudian menilai dan menimbang tentang potensi terjadinya risiko salah saji.

Mengenai risiko pengendalian, auditor menentukan apakah ada pengendalian internal yang relevan untuk mencegah dan menekan atau disebut *mitigate assessed risk*, dan dampaknya terhadap asersi yang terkait.

Pengendalian internal perfasif dan spesifik

Tuanakotta (2013:354) menyebutkan bahwa Pengendalian internal secara luas dapat dikategorikan kedalam pengendalian pervasif *pervasive controls* atau pengendalian di tingkat entitas *entity-level controls* dan pengendalian spesifik *specific controls* atau pengendalian transaksional *transaksional controls*.

Pengendalian pervasif berurusan dengan *governance* dan *general management*. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pengawasan menyeluruh *overall control environment* yang memberikan *tone at the top*. Sifatnya mengayomi, memayungi, dan meneladai. Proses pengendalian dalam kategori ini meliputi SDM, penanganan kecurangan, *risk assessment* dan masalah *management override*, *general IT management*, pembuatan *financial information* (termasuk laporan keuangan dan entitas yang mendasarinya), dan pemantauan berjalan *ongoing monitoring* terhadap operasi entitas. Dalam entitas kecil, pengendalian ini umumnya dan terutama berhubungan dengan sikap manajemen *management's attitudes* terhadap integritas dan pengendalian. Pemahaman yang baik mengenai unsur-unsur pervasif pengendalian intern memberikan dasar yang kokoh untuk menilai pengendalian yang relevan terhadap pelaporan keuangan ditingkat transaksional atau tingkat proses bisnis. Contoh, jika pengendalian atas data integritas di tingkat entitas, lemah, kelemahan ini mempengaruhi keandalan informasi yang dihasilkan sistem seperti informasi penjualan, pembelian, dan gaji.

Sedangkan pengendalian transaksional adalah pengendalian atau proses yang spesifik dirancang agar, Transaksi dicatat dengan benar untuk membuat laporan keuangan, Catatan pembukuan dibuat cukup rinci untuk mencerminkan secara benar dan wajar semua transaksi penggunaan asset, Penerimaan dan pengeluaran hanya dibuat jika ada persetujuan manajemen, dan akuisisi atau pembelian, penggunaan, atau penghapusan aset dicegah atau terdeteksi dengan cepat.

Risiko Perbankan dan jenis-jenis risiko perbankan

Perbankan adalah lembaga yang paling rentan atau berdekatan dengan risiko, khususnya risiko yang berkaitan dengan uang atau *money*, posisi perbankan sebagai mediasi yaitu pihak yang menghubungkan mereka yang surplus dan defisit finansial telah menempatkan perbankan harus selalu menjaga hubungan baik dengan kedua pihak tersebut. Keputusan perbankan harus selalu bersifat moderat yaitu mempertimbangkan keinginan dari kedua pihak tersebut karena tanpa kedua pihak tersebut perbankan tidak bisa menjalankan aktivitas secara maksimal. Dalam artian, jika perbankan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena ia memiliki finansial yang begitu surplus, itu juga dianggap tidak baik, karena ia tidak menjalankan fungsinya sebagai *agent of development*. Namun sebaliknya jika ia tidak hati-hati dalam menyalurkan pinjaman, maka perbankan sendiri yang akan menerima akibatnya yaitu salah satunya adalah timbul kredit macet. Untuk mengontrol risiko atau *control risk* dibutuhkan suatu ilmu dan seni tersendiri agar risiko itu memberi dampak positif pada pihak yang bersangkutan. Jika bisnis yang dijalankan itu menyenangkan produksi dan pemasaran

barang atau jasa, maka berarti risiko tersebut adalah menyangkut risiko yang akan dialami oleh barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Seperti risiko yang akan timbul pada bisnis pengolahan selai nanas, jika risiko yang akan ditimbulkan adalah berupa selai nanas tersebut akan mengalami masa kadaluarsa. Jika tidak terjual sesuai dengan waktu yang ditargetkan, produksi selai nanas bisa terhenti dan distributor bisa mengalami kekecewaan pada saat pasokan nanas tidak sampai dipabrik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Idroes (2008:22) Menyatakan bahwa banyak teori yang tersedia untuk mendefinisikan jenis-jenis risiko dalam menjalankan bisnis perbankan. Pada dasarnya jenis-jenis risiko yang dihadapi dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu risiko finansial. Risiko finansial terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi. Pada sisi lain, risiko nonfinansial terkait kepada kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara jelas jumlah uang yang hilang. Dampak finansial dari risiko finansial tidak langsung dapat dirasakan. Contoh kasus seperti kehilangan nasabah dan kehilangan bisnis akibat risiko yang terjadi tidak langsung membuat bank menjadi rugi. Namun pada gilirannya, risiko nonfinansial berpotensi untuk menimbulkan kerugian finansial. Untuk menjaga konsistensi dan kontinuitas pembahasan, maka jenis-jenis risiko yang diangkat adalah jenis-jenis risiko yang diharuskan untuk dikelola industri perbankan menurut Komite Basel II. Jenis-jenis risiko yang dimaksud adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko konsentrasi kredit, risiko suku bunga pada buku bank, termasuk kedalam risiko finansial. Berikut ini adalah definisi tentang, risiko bisnis, stratejik, serta reputasional termasuk kedalam risiko finansial

Jenis Opini

Menurut Mulyadi (2002:416). Jenis opini ada lima jenis, berikut ini adalah penjelasan dari lima jenis opini tersebut:

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau (*Unqualified Opinion*)

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika Semua laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan, dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor, bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*).

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelas yang lain, dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditamahnya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah ketidak adanya konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima Umum, keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas, Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, penekanan atas suatu hal, laporan audit yang melibatkan auditor lain.

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditee menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit, auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

d. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan audit tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

e. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit, dan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data tertulis mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang disajikan dan selanjutnya diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti. Studi dokumentasi tidak hanya terbatas pada data sekunder fisik saja. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, layak pula dicantumkan data sekunder dalam bentuk format tertentu yang bisa dikenali oleh perangkat teknologi informasi, hasil *output* program komputer *software*.

Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data tertulis mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang disajikan dan selanjutnya diolah sesuai dengan kebutuhan peneliti. Studi dokumentasi tidak hanya terbatas pada data sekunder fisik saja. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, layak pula dicantumkan data sekunder dalam bentuk format tertentu yang bisa dikenali oleh perangkat teknologi informasi, hasil *output* program komputer *software*.

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini dan untuk memperoleh kesimpulan, maka data yang telah dikumpulkan akan dianalisis lebih lanjut dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif, akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis.

Mekanisme pembahasan dari penelitian ini menggunakan prosedur umum yang berlaku, yaitu (1) Membahas dan menganalisis data yang ada, dengan mengacu pada *control risk* perusahaan mengenai prosedur pengeluaran kas; (2) Menyimpulkan hasil analisis sesuai masalah yang ada dan memberikan masukan kepada PT.BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL atas risiko pengendalian sistem pengeluaran kas; (3) Menentukan Salah Saji

Material Pada Pengeluaran Kas Teller BTPN; (4) Laporan arus kas bank BTPN dari tahun 2010 sampai dengan 2015.

Dalam penelitian ini, peneliti juga memakai studi *observasi*. Yaitu data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terperinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks kegiatan itu terjadi. Data itu diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi saja tidak akan memadai dalam melakukan penelitian. Mengamati kegiatan dan kelakuan orang saja tidak dapat mengungkapkan apa yang diamati. Oleh karena itu observasi harus dilengkapi dengan wawancara.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sistem pengendalian pengeluaran kas Teller BTPN purnabakti

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilapangan yang dilakukan penulis pada BTPN KC Surabaya, terdapat dua sistem pengeluaran kas, berikut ini adalah dua sistem pengendalian *intern* pengeluaran kas *teller* BTPN purnabakti KC Surabaya, Berikut ini adalah Sistem pengendalian intern pada pencairan kredit BTPN purnabakti:

a. Dokumen

Seluruh foto copy dokumen untuk debitur baru dan pembaharuan harus melalui proses autentifikasi dalam hal ini diberi cap dan paraf oleh petugas yang melakukan proses wawancara dan verifikasi, tujuan dari autentifikasi dokumen adalah untuk meyakinkan bahwa dokumen *copy* yang diterima oleh bank BTPN adalah sesuai dan sama dengan dokumen aslinya. Sedangkan verifikasi dilakukan untuk menguji seluruh keabsahan dan keaslian dokumen, selain itu verifikasi validitas informasi calon debitur dilakukan dengan mewawancarai debitur untuk memastikan kebenaran identitas, kecocokan dan konsistensi informasi lisan dengan dokumen yang telah diberikan, kapasitas, kelayakan, dan kesehatan debitur, karena kesehatan debitur sangat penting dalam proses peminjaman agar tidak terjadi kerugian dalam menentukan besar dan kecilnya jumlah pinjaman, dan yang terpenting dari ketiga verifikasi ini adalah verifikasi dengan metode wawancara, karena proses ini dilakukan ditingkat kantor cabang oleh personil yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai mengenai produk kredit pensiun.

b. *Credit checking*

Tujuan dari kredit ceking ini adalah untuk memperoleh informasi serta konfirmasi tentang keadaan debitur yang berkaitan dalam hubungannya dengan bank, termasuk fasilitas kredit, kolektabilitas debitur, dan sebagainya yang dapat menunjang keamanan proses peminjaman di BTPN, dan sumber yang didapat berasal dari sumber *internal* maupun *external*. Contoh (1) *Internal checking* Menggunakan *database core banking system* atau dapat disebut dengan MISYS untuk mengecek eksistensi dari calon debitur di bank BTPN dan status pinjaman yang telah dimiliki, jika ada, (2) *External checking* Dalam hal ini ada tiga cara *external credit* (a) *Checking* berlaku mandatory atau sifatnya wajib bagi debitur *take over* dan *walk in* non BTPN, kepada kantor bayar uang pensiun dan pengelola dana pensiun; (b) *survey* ke alamat tempat tinggal, untuk calon debitur yang memerlukan klarifikasi atau tambahan data, apabila terdapat keraguan dalam proses wawancara atau mencegah terjadinya data informasi lisan tidak konsisten dengan data dokumen yang diterima; (c) *BI checking*, mengakses informasi dari bank sentral dengan meminta *BI checking*, hal ini dilakukan jika *checking* kepada kantor bayar uang pensiun dan pengelola dana pensiun tidak dapat dilakukan dan *print out* hasil *BI checking*, wajib dilampirkan pada dokumen kredit debitur.

c. Persetujuan kredit dan kriteria persetujuan

Persetujuan tingkat pertama otomatis diberikan jika terpenuhi syarat sebagai berikut (1) Persyaratan dan kondisi kredit terpenuhi dalam hal ini harus dicantumkan dalam kriteria persetujuan didalam aplikasi kredit pensiun yang juga berfungsi sebagai memo persetujuan kredit; (2) Dokumen lengkap dan absah, dalam hal ini kolom persetujuan kredit dalam aplikasi kredit pensiun ditanda tangan oleh *credit acceptance*; (3) Persetujuan tingkat kedua diberikan oleh pemutus kredit yang berwenang sesuai dengan BWMK atau biasa disebut dengan batas wewenang memutus kredit; (4) Kolom persetujuan kredit dalam aplikasi kredit pensiun ditanda tangan oleh *credit acceptance supervisor, branch manager, area business head*.

d. Otomasi persetujuan kredit

Mekanisme persetujuan kredit pensiun ditunjang dengan menggunakan aplikasi *loan approval and pensiun payment system* atau biasa disebut dengan LAPPS yang dirancang untuk mempercepat proses pelayanan kepada debitur pensiunan, aplikasi ini akan mencakup pelayanan pembayaran uang pensiun bulanan dan persetujuan produk kredit pensiun secara *online*. Persetujuan dilakukan dengan menggunakan *User ID* dan *Password* yang bersifat unik dan rahasia untuk setiap pemutus kredit sesuai dengan wewenang memutus kredit yang diberikan, *User ID* yang tercatat dalam sistim akan berperan sebagai pengganti sementara tanda tangan basah pada lembar memo persetujuan kredit yang berasal dari kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

e. Sistem pengendalian intern pada proses penggajian pensiun BTPN purnabakti:

(1) Bank wajib memastikan dana yang diterima dari mitra kerja sesuai dengan dana yang harus dibayarkan atau dikreditkan ke rekening penerima pensiun yang tercantum dalam daftar pembayaran pensiun; (2) Pengkreditan ke rekening penerima pensiun harus dilakukan setelah dana diterima secara efektif pada bank; (3) Apabila terdapat perbedaan data, dana, nomor rekening, nama penerima pensiun, bank harus meinformasikan kepada mitra kerja pengelola pensiun. pembayaran pensiun yang berbeda tersebut tidak boleh dilakukan sampai bank menerima konfirmasi, persetujuan, atau perbaikan perubahan tertulis dari mitra kerja pengelola pensiun; (4) Apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang disebabkan penerima pensiun telah meninggal dunia atau tidak berhak menerima pembayaran pensiun atau karena keterlambatan dalam pencetakan dapem atau karena penerima pensiun tidak berhak karena sebab-sebab tertentu, bank wajib menyetorkan kembali ke rekening mitra kerja pengelola pensiun sebesar dan yang telah terbayarkan dengan mendebet rekening penerima pensiun, dan dilakukan sebelum melewati batas waktu pengembalian yang ditentukan; (5) Pengembalian atau biasa disebut dengan *retur* pembayaran pensiun dengan alasan penerima pensiun telah meninggal dunia, penerima pensiun tidak mengambil pensiun lebih dari enam bulan berturut-turut, atau sebab lainnya yang menyebabkan pembayaran pensiun tidak dapat dilaksanakan, harus dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari mitra kerja pengelola pensiun; (6) Bank wajib secara langsung mengembalikan dana penerima pensiun kepada mitra kerja pengelola pensiun sebelum batas waktu maksimal yang ditentukan, apabila pada dapem tidak tercantum nomor rekening penerima pensiun yang dimaksud; (7) Apabila bank mengetahui dengan pasti bahwa penerima pensiun yang berhak telah meninggal dunia, bank wajib melaporkan secara tertulis kepada mitra kerja pengelola pensiun dengan dilengkapi dengan dokumen pendukung kematian misalnya surat kematian; (8) Pembayaran kepada ahli waris dilakukan setelah mendapat persetujuan dari mitra kerja pengelola pensiun, proses pembayaran kepada ahli waris dilakukan sesuai dengan ketentuan pembayaran kepada ahli waris yang berlaku; (9) Apabila penerima pensiun mempunyai kewajiban untuk mengembalikan atau mengangsur pinjaman, maka pemotongan untuk pengembalian atau angsuran pinjaman tersebut dilakukan

setelah pemindah bukuan ke nomor rekening penerima pensiun, proses ini dilakukan system secara otomatis.

f. Sistem pengendalian intern pada proses pengambilan pensiun BTPN purnabakti dengan menggunakan surat kuasa:

Dalam hal ini BTPN memfasilitasi nasabah yang tidak dapat melakukan penarikan atau pengambilan gaji pensiun karena sakit atau sebab lainnya yang disebutkan dalam surat kuasanya, maka penarikan gaji pensiun atau tabungan citra pensiun dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa yang sah dari nasabah pensiunan dan harus dilakukan sesuai ketentuan berikut ini: (1) Surat kuasa harus dibubuhi materai sesuai ketentuan bea materai; (2) Surat kuasa harus dilengkapi dengan foto diri pensiunan, apabila dipersyaratkan oleh mitra kerja atau bila verifikasi tanda tangan tidak dapat dilakukan; (3) Surat kuasa harus diserahkan sekurang-kurangnya oleh lurah atau kepala desa tempat pensiunan berada. Penyimpangan dari ketentuan ini dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan contoh formulir dari mitra kerja atau disampaikan oleh mitra kerja kepada bank dengan surat secara terpisah; (4) Penerima kuasa tidak boleh memberikan kuasa kepada pihak lainnya atau surat kuasa tanpa hak substitusi; (5) Surat kuasa hanya berlaku untuk satu penerima pensiun dan tidak dapat digunakan secara kolektif; (6) Bank, karyawan bank, dan karyawan mitra kerja pengelola pensiun dilarang menjadi penerima kuasa; (7) Penarikan atau pengambilan dengan surat kuasa secara berturut-turut dibatasi maksimum tiga kali penarikan gaji penuh dalam tiga bulan, setelah penarikan ke tiga, harus dilakukan oleh nasabah pensiun yang bersangkutan terlebih dahulu baru kemudian dapat dilakukan penarikan dengan surat kuasa kembali.

Menentukan Salah Saji Material Pada Pengeluaran Kas Teller BTPN purnabakti.

a. Pedoman materialitas

Materialias adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.

b. Konsep materialitas kualitatif:

Adalah materialitas yang menggunakan ukuran kualitatif yang lebih ditentukan pada pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional tersebut didasarkan pada cara pandang, pengetahuan, dan pengalaman pada situasi dan kondisi tertentu. Berikut ini adalah contoh materialitas kualitatif yang berupa opini dan dicatat dalam laporan auditor independen kepada para pemegang saham, dan disajikan dalam laporan tahunan BTPN secara online sesuai perundang-undangan yang berlaku. berikut ini adalah keterangan dari kantor akuntan publik independen: (1) Opini kantor akuntan publik PWC yang biasa disebut dengan *Price waterhouse Coopers* Tahun 2010. Berikut ini adalah kutipannya, Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang disebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk tanggal 31 desember 2010, sesuai dengan standar akuntansi di indonesia. Sebagai mana diungkapkan dalam catatan 2.b atas laporan keuangan, efektif sejak tanggal 1 januari 2010, bank mengadopsi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 60, instrumen keuangan: pengungkapan, yang diterapkan secara prospektif, dan sebagaimana diungkapkan dalam catatan 44 atas laporan keuangan, bank mereklasifikasi beberapa akun untuk menerapkan peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.7 tertanggal 25 juni 2010 mengenai pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emitmen atau perusahaan Publik (Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisono & Rekan, 2010); (2) Opini kantor akuntan publik PWC yang biasa disebut dengan *Pric ewaterhouse Coopers* Tahun 2011. Berikut ini adalah kutipannya, Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang disebut diatas

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk tanggal 31 desember 2011, sesuai dengan standar akuntansi di indonesia. Sebagai mana diungkapkan dalam catatan 2.b atas laporan keuangan, efektif sejak tanggal 1 januari 2010, bank mengadopsi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 60, instrumen keuangan: pengungkapan, yang diterapkan secara prospektif, dan sebagaimana diungkapkan dalam catatan 44 atas laporan keuangan, bank mereklasifikasi beberapa akun untuk menerapkan peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.7 tertanggal 25 juni 2010 mengenai pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emitmen atau perusahaan Publik (Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisono & Rekan, 2011); (3) Opini kantor akuntan publik PWC yang biasa disebut dengan *Price waterhouse Coopers* Tahun 2012. Berikut ini adalah kutipannya, Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang disebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk tanggal 31 desember 2012, sesuai dengan standar akuntansi di indonesia. Sebagai mana diungkapkan dalam catatan 2.b atas laporan keuangan, efektif sejak tanggal 1 januari 2010, bank mengadopsi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 60, instrumen keuangan: pengungkapan, yang diterapkan secara prospektif, dan sebagaimana diungkapkan dalam catatan 44 atas laporan keuangan, bank mereklasifikasi beberapa akun untuk menerapkan peraturan Bapepam-LK No.VIII.G.7 tertanggal 25 juni 2010 mengenai pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emitmen atau perusahaan Publik (Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisono & Rekan, 2012); (4) Opini kantor akuntan publik PWC yang biasa disebut dengan *Price waterhouse Coopers* Tahun 2013, Berikut ini adalah kutipannya, Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk tanggal 31 Desember 2013, kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisono & Rekan, 2013);(5) Opini kantor akuntan publik PWC yang biasa disebut dengan *Price waterhouse Coopers* Tahun 2014. Berikut ini adalah kutipannya, Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk tanggal 31 Desember 2014, kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisono & Rekan, 2014).

c. Materialitas kuantitatif

Adalah materialitas yang menggunakan ukuran kuantitatif tertentu seperti nilai uang, jumlah waktu, frekuensi, maupun jumlah *unit*. Berikut ini adalah keterangan dari kantor akuntan publik independen yang disajikan secara kuantitatif:

Tabel 1
Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir per 31 desember
2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

TAHUN	2014	2013	2012	2011	2010
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN Kas dan setara kas akhir tahun Terdiri dari	12,516,644	10,382,350	14,879,886	7,712,685	8,334,401
Kas	1,129,677	1,102,840	929,454	820,624	701,345
Giro pada bank Indonesia	4,628,496	4,311,653	4,049,000	3,218,561	2,247,952
Giro pada bank lain	94,205	17,228	45,099	26,172	72,580
Penempatan pada bank indonesia dan bank lain	<u>6.664.266</u>	<u>4,950,629</u>	<u>9,856,333</u>	<u>3,647,328</u>	<u>5,312,524</u>
TOTAL	12,516,644	10,382,350	14,879,886	7,712,685	8,334,401
Opini audit	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sistim pengendalian interen	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Tingkat Materialitas	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Prosentase salah saji material (5%+10%)	938,748	778,676	1,100,000	578,451	400,383
2					

Sumber: Laporan keuangan PT.BTPN 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Berikut ini adalah kesimpulan yang didapat oleh peneliti per tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut: (1) Data dari laporan keuangan Bank BTPN tahun 2010, peneliti mengambil kesimpulan bahwa jika Sistim Pengendalian *Intern* baik, risiko pengendaliannya rendah, dan jika materialitas tinggi, risiko pengendaliannya rendah, dalam hal ini toleransi kesalahan maksimal adalah Rp. 400,383,000. Apabila ada salah saji kas yang jumlahnya dibawah Rp. 400,383,000 jika tidak dikoreksi, hal ini tidak berpengaruh terhadap opini auditor, sehingga opini auditor tetap WTP atau disebut dengan wajar tanpa pengecualian. Namun apabila ada salah saji pada kas \geq Rp. 400,383,000 dan tidak dikoreksi maka opini auditor adalah wajar dengan pengecualian;(2) Data dari laporan keuangan Bank BTPN tahun 2011, peneliti mengambil kesimpulan bahwa jika Sistim Pengendalian *Intern* baik, risiko pengendaliannya rendah, dan jika materialitas tinggi, risiko pengendaliannya rendah, dalam hal ini toleransi kesalahan maksimal adalah Rp. 578,451,000. Apabila ada salah saji kas yang jumlahnya dibawah Rp. 578,451,000 jika tidak dikoreksi, hal ini tidak berpengaruh terhadap opini auditor, sehingga opini auditor tetap WTP atau disebut dengan wajar tanpa pengecualian. Namun apabila ada salah saji pada kas \geq Rp. 578,451,000 dan tidak dikoreksi maka opini auditor adalah wajar dengan pengecualian; (3) Data dari laporan keuangan Bank BTPN tahun 2013, peneliti mengambil kesimpulan bahwa jika Sistim Pengendalian *Intern* baik, risiko pengendaliannya

rendah, dan jika materialitas tinggi, risiko pengendaliannya rendah, dalam hal ini toleransi kesalahan maksimal adalah Rp. 1,000,000,000. Apabila ada salah saji kas yang jumlahnya dibawah Rp. 1,000,000,000 jika tidak dikoreksi, hal ini tidak berpengaruh terhadap opini auditor, sehingga opini auditor tetap WTP atau disebut dengan wajar tanpa pengecualian. Namun apabila ada salah saji pada kas \geq Rp. 1,000,000,000 dan tidak dikoreksi maka opini auditor adalah wajar dengan pengecualian; (4) Data dari laporan keuangan Bank BTPN tahun 2014, peneliti mengambil kesimpulan bahwa jika Sistem Pengendalian *Intern* baik, risiko pengendaliannya rendah, dan jika materialitas tinggi, risiko pengendaliannya rendah, dalam hal ini toleransi kesalahan maksimal adalah Rp. 778,676,000. Apabila ada salah saji kas yang jumlahnya dibawah Rp. 778,676,000. jika tidak dikoreksi, hal ini tidak berpengaruh terhadap opini auditor, sehingga opini auditor tetap WTP atau disebut dengan wajar tanpa pengecualian. Namun apabila ada salah saji pada kas \geq Rp. 778,676,000. Dan tidak dikoreksi maka opini auditor adalah wajar dengan pengecualian; (5) Data dari laporan keuangan Bank BTPN tahun 2014, peneliti mengambil kesimpulan bahwa jika Sistem Pengendalian *Intern* baik, risiko pengendaliannya rendah, dan jika materialitas tinggi, risiko pengendaliannya rendah, dalam hal ini toleransi kesalahan maksimal adalah Rp. 938,748,000. Apabila ada salah saji kas yang jumlahnya dibawah Rp. 938,748,000. jika tidak dikoreksi, hal ini tidak berpengaruh terhadap opini auditor, sehingga opini auditor tetap WTP atau disebut dengan wajar tanpa pengecualian. Namun apabila ada salah saji pada kas \geq Rp. 938,748,000. Dan tidak dikoreksi maka opini auditor adalah wajar dengan pengecualian.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan pembahasan yang telah dikemukakan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

(1) Sistem pengendalian *intern* pengeluaran kas pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dari hasil audit selama lima tahun berturut-turut mulai tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah WTP atau biasa disebut dengan wajar tanpa pengecualian; (2) Dalam menentukan salah saji material pada pengeluaran kas PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, peneliti berpedoman kepada aturan dari badan pemeriksa keuangan tahun 2008, yang aturannya adalah jika pada entitas nirlaba sistem pengendalian *intern* akan memadai jika tingkat salah saji materialitasnya 5% dari pendapatan atau belanja, dan khusus untuk perusahaan terbuka, tingkat salah saji materialitasnya 5% dari laba sebelum pajak. Berdasarkan data dari hasil audit selama lima tahun berturut-turut mulai tahun 2010 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa tingkat salah saji kas pada PT. BTPN masih dalam kondisi wajar tanpa pengecualian karena masih dibawah dari standar yang telah ditentukan; (3) Karena sistem pengendalian *intern* baik, risiko pengendaliannya rendah, ini dibuktikan dari toleransi kesalahan maksimal yang dialami PT. BTPN per tanggal 31 desember 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, masih dibawah dari jumlah yang telah ditentukan sebagaimana telah disajikan di bab empat.

Saran

Setelah menguraikan pembahasan dan mengemukakan kesimpulan terhadap PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional tbk, Peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran yang dapat digunakan atau menjadi bahan pertimbangan bagi auditor PT. BTPN tbk dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan audit internal dan meningkatkan efektifitas pengendalian internal pengeluaran kas, yaitu: (1) Bagi investor atau calon investor PT. BTPN sangat baik dalam mengelola sistem pengendalian *intern*, Hal ini dibuktikan dari hasil audit selama lima

tahun berturut-turut mulai tahun 2010 sampai dengan 2015 adalah WTP atau biasa disebut dengan wajar tanpa pengecualian, sehingga menurut peneliti bahwa PT. BTPN adalah tempat yang baik dalam menanamkan modal saham dan PT. BTPN dapat bersaing dan tidak boleh dianggap sebelah mata dalam dunia perbankan di Indonesia; (2) Bagi perusahaan sebaiknya jangan terlena oleh opini auditor eksternal, dan harus lebih ditingkatkan lagi dan harus berinovasi lagi dalam pelayanan dan manajemen risiko yang ada, agar PT. BTPN tidak kalah bersaing dan dipandang sebelah mata di dunia perbankan Indonesia dan akan menjadi perusahaan yang sangat di perhitungkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2008. *Pedoman Materialitas*. Jakarta.
- Harjito, D. A. dan Martono. 2014. *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua. EKONOSIA Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Idroes, N. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia*. RAJA GRAFINDO PERSADA. Jakarta.
- Indriantoro, N., dan B. Supomo, 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga. BPFE-UGM. Yogyakarta..
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 2008. *PANDUAN AUDIT ENTITAS BISNIS KECIL*. Salemba Empat. Jakarta.
- Lapoliwa N, Kuswandi S. 2000. *Akuntansi Perbankan jilid satu*, Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
- Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan Keduapuluh. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyadi, 2002. *Auditing* . Edisi enam. Cetakan pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Tuanakotta, M. 2011. *Berpikir Kritis dalam Auditing*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2013. *Internasional Standards on Audit (ISA)*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2015. *Audit Kontemporer*, Salemba Empat. Jakarta.
- Umar, H. 1998. *Manajemen Risiko Bisnis (pendekata Finansial dan non finansial)*, Buku Satu. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.